

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA ATAU KAJIAN TEORI

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, pada bab ini, tentu sebagai peneliti akan mengulas mengenai konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagaimana menyesuaikan dengan judul penelitian yakni; “Pengembangan Ekonomi Local (Local Economic Development) melalui Pembinaan Pengrajin Tenun Ikat di Kabupaten Ende (studi pada pengembangan tenun ikat Aenari di kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur)”.

Dalam hal ini, ada beberapa pokok bahasan yang akan diulas didalam sub-bab ini yaitu; ulasan pertama terkait dengan penelitian terdahulu, yang mana dalam penelitian terdahulu ini dimaksud penulis akan mereview secara singkat dan jelas dari beberapa jurnal penelitian terdahulu dengan menggunakan metode analisis yang sama untuk dijadikan pisau analisis terhadap konteks permasalahan yang ada dan penelitian terdahulu juga sebagai panduan penulis guna menambah referensi terkait dengan konsep dari pengembangan ekonomi local (*local economic development*). Kedua, menjelaskan sejarah dari konsep pengembangan ekonomi local, dalam hal ini dapat mempermudah peneliti guna mengetahui genealogis dari konsep yang digunakan dan juga sebagai dasar pemikiran penulis melihat persoalan-persoalan yang terjadi. Ketiga, penulis mendeskripsikan lebih terperinci terkait pengertian, tujuan dan sasaran, tahapan-tahapan serta penerapan pendekatan pengembangan ekonomi local.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Etika Ari Susanti, Imam Hanafi, Romula Adiono (2014) dengan judul; *Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Sektor Pertanian (Studi pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)*. pada penelitian ini menggunakan konsep yang sama untuk menganalisis suatu problem dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan potensi ekonomi local di Kecamatan Pagelaran. Dari kajian sebelumnya menyatakan bahwa kecamatan pagelaran merupakan daerah yang sudah menerapkan konsep pengembangan ekonomi lokal untuk mengembangkan wilayahnya. Penelitian ini difokuskan pada sektor pertanian dimana sektor pertanian merupakan sektor basis yang perlu dikembangkan.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa penerapan konsep pengembangan ekonomi lokal (local economic development) di Kecamatan Pagelaran menuai dampak positif. Pada akhirnya dengan diadakannya konsep pengembangan ekonomi lokal ini, maka masyarakat sangat mudah memperoleh lapangan kerja baru dan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan hidup, serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.¹

Penelitian terdahulu oleh Vinza Firqinia Fristia dan Ardy Maulidy Navastara (2014) dengan judul; *Faktor Penyebab Belum Berkembangnya Industri Kecil Batik Desa Kenongo Kecamatan Tulangan-Sidoarjo*. Peneliti ini mengeksplorasi mengenai faktor penyebab belum berkembangnya industri kecil batik yang telah didapatkan pada hasil deskriptif sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan, Masih belum optimalnya perkembangan industri kecil batik Desa

¹ Etika Ari Susanti, Imam Hanafi, Romula Adiono. *Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Sektor Pertanian (Studi pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, Hal 31-40

Kenongo yang diharapkan mampu menjadi penopang peningkatan perekonomian masyarakat dan menjadi produk unggulan daerah Desa Kenongo.²

Penelitian terdahulu oleh, Ainul Fadilah Rachmawati, Mochammad Saleh Soeaidy, Romula Adiono (2015) dengan judul; *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (Studi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang dan Sentra Industri Kerajinan Cor Kuningan Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep pengembangan ekonomi lokal (*local economic development*) sebagai pisau analisis terhadap penerapan pengembangan sektor industri Kabupaten Jombang yang masih mengalami kendala termasuk yang terjadi pada sentra industri kerajinan cor kuningan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa adanya upaya dari Disperindagpas yaitu meliputi: Pengembangan sumber daya manusia (SDM), Fasilitasi pemasaran produk kerajinan cor kuningan, dan Fasilitasi akses permodalan. Hasil dari adanya upaya dari Disperindagpas dapat memberikan perluasan kesempatan kerja dan berusaha, perluasan peningkatan pendapatan, keberdayaan sentra industri kerajinan cor kuningan dalam proses produksi dan pemasaran, keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah dan pengusaha kerajinan cor kuningan³.

Penelitian terdahulu oleh, Risnawati (2016) dengan judul; *Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Melalui Pemberdayaan Industri Kecil Kain Tenun Tradisional (Kain Mbojo) Kabupaten Bima*. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan konsep pengembangan ekonomi

² Vinza Firqinia Fristia dan Ardy Maulidy Navastara (2014); *Faktor Penyebab Belum Berkembangnya Industri Kecil Batik Desa Kenongo Kecamatan Tulangan-Sidoarjo*. JURNAL Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: 2337-3539.

³ Ainul Fadilah Rachmawati, Mochammad Saleh Soeaidy, Romula Adiono, (2015). *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (Studi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang dan Sentra Industri Kerajinan Cor Kuningan Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 7, Hal. 1255-1260.

lokal (*local economic development*) guna mengkaji berbagai aspek variasi permasalahan yang dihadapi pengrajin dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal ini, dimulai dari keterbatasan modal, kurangnya pengetahuan maupun teknologi produksi, kesulitan dalam pemasaran serta ekonomi kreatif masyarakat belum didukung dengan pendanaan modal usaha.

Kesimpulannya bahwa pilihan pengembangan ekonomi lokal merupakan pilihan yang tepat untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal tenun tradisional Kain Mbojo ini, sehingga budaya tradisi dari pengrajin kain tenun ini tidak kehilangan pamor dan dapat memperkuat, memandirikan, menswadayakan, meningkatkan posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah serta dapat mendukung pembangunan daerah⁴.

Penelitian terdahulu oleh Silvera Sekar Wijayanti, Darwanto (2016) dengan judul; *Implementasi Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pembentukan Klaster di Kabupaten Semarang*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep pengembangan ekonomi lokal (*local economic development*). Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengembangan Ekonomi Lokal dengan mengangkat potensi lokal berupa tanaman enceng gondok di Desa Kebondowo memiliki peranan yang baik untuk masyarakat. Adanya Klaster Klinting dapat membantu masyarakat sekitar untuk menambah penghasilan mereka dan mengurangi pengangguran karena mampu menyerap tenaga kerja di Desa Kebondowo. Selain itu, para pengrajin enceng gondok dapat berkontribusi hasil kerajinan mereka meskipun belum secara maksimal⁵.

Penelitian terdahulu oleh Dicky Kurniawan dengan judul; *Alternatif Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kota Pontianak Studi Kasus Pertanian Lidah Buaya*. Penelitian ini

⁴ Risnawati, (2016) .*Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Melalui Pemberdayaan Industri Kecil Kain Tenun Tradisional (Kain Mbojo) Kabupaten Bima*. National Conference On Economic Education ISBN: 978-602-17225-5-8

⁵ Silvera Sekar Wijayanti, Darwanto (2016). *Implementasi Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Pembentukan Klaster Di Kabupaten Semarang*. VOL. 3 NO. 1,ISSN 2407-6635

menggunakan konsep pengembangan ekonomi local (local economic development) yang mana peneliti akan mengkaji peran pertanian lidah buaya sebagai pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Pontianak Utara, yang ditelusuri melalui kajian: peran makro (peran pertanian terhadap pendapatan dan tenaga kerja wilayah) dan peran mikro (kesejahteraan dan pola belanja petani).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara makro (wilayah) peran pertanian lidah buaya masih terbilang kecil, dan secara mikro (rumah tangga) telah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan multiplier meskipun dalam jumlah yang belum begitu besar.⁶

Penelitian terdahulu oleh indah Yuni Astuti, Muhammad Alfa Niam, Tri Handayani (2019) dengan judul penelitian; *Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Olahan Buah Nanas Di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri*. Peneliti ini menggunakan pendekatan pengembangan ekonomi local melalui program pengabdian masyarakat di desa Bedali dalam hal ini kegiatan tersebut sudah mendapatkan perijinan dari pemerintah setempat.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat peningkatan produksi sari buah nanas oleh ibu-ibu PKK Desa Bedali. Sebelum adanya kegiatan ini sari buah yang mampu diproduksi sebanyak 1.000 cup per bulan, setelah adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini meningkat menjadi 2.000 cup per bulan. Produk yang dihasilkan juga lebih bervariasi dengan adanya produk tambahan berupa selai nanas dan kue. Tenaga kerja yang terlibat dalam pembuatan sari buah nanas juga bertambah dari 10 orang menjadi 20 orang setelah kegiatan pengabdian masyarakat ini.⁷

⁶ Dicky Kurniawan (2010). *Alternatif Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kota Pontianak Studi Kasus Pertanian Lidah Buaya*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 21/No.1 April 2010

⁷ indah Yuni Astuti, Muhammad Alfa Niam, Tri Handayani (2019) dengan judul penelitian; *Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Olahan Buah Nanas Di Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri*. Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat 1 (2), 2019, 66-74

Penelitian terdahulu oleh Nimas Asriningputri dan Ketut Dewi Martha Erli Handayeni (2018), tentang; *Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan di Kecamatan Bulak Melalui Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal*. Dalam penelitian ini menggunakan konsep pengembangan ekonomi local dengan Variabel penelitian berjumlah 20 variabel yang terbagi menjadi 6 indikator antara lain indikator sumber daya alam lokal, sumber daya manusia lokal, pemasaran, produksi, sarana prasarana, dan kelembagaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat lima strategi prioritas pengembangan meningkatkan nilai jual produk yaiyu; melalui pemberian label pada kemasan produk kerupuk serta ikan asin dan pemberian kemasan vacuum pada produk ikan asap, menerapkan sistem penyortiran bahan baku dan pemasaran hasil produk secara terpusat di SIB, memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemasaran hasil produk olahan, memperluas jangkauan pemasaran melalui kegiatan pameran dan pengadaan kemitraan dengan toko oleh-oleh khas Surabaya, dan meningkatkan kerjasama pemerintah dan pelaku usaha terkait pengembangan kualitas tenaga kerja dalam pengolahan produk dan pengelolaan modal.⁸

Penelitian terdahulu oleh Dina Juniar, Warsilan Warsilan, Emmilya Umma Aziza Gaffar (2018) dengan judul; *Pengembangan ekonomi lokal melalui desa wisata budaya pampang*. Penelitian ini menggunakan konsep pengembangan ekonomi local untuk mengetahui peran Desa Wisata Budaya Pampang sebagai penggerak Pengembangan Ekonomi Lokal di Kelurahan Pampang. Keberhasilan Pengembangan Ekonomi Lokal dapat dilihat dari pendapatan dan keadaan perekonomian pelaku usaha yaitu pengrajin manik dan penari atraksi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wisata Budaya Pampang dapat dijadikan sebagai penggerak Pengembangan Ekonomi Lokal yang dilihat dari adanya hubungan

⁸ Nimas Asriningputri dan Ketut Dewi Martha Erli Handayeni (2018). *Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan di Kecamatan Bulak Melalui Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal*.

dalam aktifitas pemicu yaitu industri kerajinan manik yang menjadi faktor meningkatnya Pendapatan dan Keadaan Perekonomian namun dalam atraksi tari masih kurang dalam mendukung peningkatan pendapatan⁹.

Penelitian terdahulu oleh Alfian Hidayat dan Purnami Safitri (2019) dengan judul; *Pengembangan Komoditas Rumput Laut Nusa Tenggara Barat Dengan Model Hexagon Untuk Pembangunan Ekonomi Lokal (Development Of Seaweed Commodities In West Nusa Tenggara Using The Hexagon Model For Local Economic Development)*. Rumput laut sebagai komoditas unggulan daerah NTB belum secara maksimal dikelola dengan baik. Potensi yang besar serta didukung dengan kultur masyarakat pesisir seharusnya mampu menjadikan komoditas rumput laut NTB berdaya saing tinggi. Kondisi permasalahan mendasar diatas kemudian menarik untuk diteliti dengan model Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai metode dalam melihat permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi NTB sesungguhnya telah memulai program Pembangunan Ekonomi Lokal, namun belum optimal dalam beberapa program yang telah dilakukan mulai dari pemilihan kelompok target yang disesuaikan dengan kapasitas industrial daerah, penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang aktifitas ekonomi, keberhadiran kebijakan dan regulasi yang bersiat pro-environment dan pro-poor untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan, hingga pada upaya sinergisitas para stakeholders serta upaya monitoring dan evaluasi.¹⁰

⁹ Dina Juniar, Warsilan Warsilan, Emmilya Umma Aziza Gaffar (2018) dengan judul; *Pengembangan ekonomi lokal melalui desa wisata budaya pampang*. Vol 3, No 3 (2018)

¹⁰ Alfian Hidayat dan Purnami Safitri (2019) dengan judul; *Pengembangan Komoditas Rumput Laut Nusa Tenggara Barat Dengan Model Hexagon Untuk Pembangunan Ekonomi Lokal (Development Of Seaweed Commodities In West Nusa Tenggara Using The Hexagon Model For Local Economic Development)*. J. Kebijakan Sosek KP Vol. 9 No. 1 Juni 2019: 45-55

2.2 Pengembangan Ekonomi Lokal (*Local Economic Development*)

2.2.1 Sejarah Pengembangan Ekonomi Lokal (*Local Economic Development*)

Pengembangan ekonomi lokal dan daerah, pada mulanya berkembang di negara-negara Eropa dan di Amerika Serikat sejak tahun 1960. Wolfe and Creutzberg (2003) menjelaskan pengembangan ekonomi lokal telah mengalami tiga tahapan besar atau gelombang pengembangan, yaitu (1) pengembangan dengan pendekatan tradisional (*traditional approach*); (2) pengembangan kapasitas (*capacity building approach*); dan (3) pengembangan yang fokus pada kualitas kehidupan dan aliran informasi. Pendekatan tradisional (*traditional approach*) yang berkembang sejak periode 1950-an sampai dengan pertengahan 1980-an memfokuskan pada upaya menarik perusahaan-perusahaan milik pribadi atau swasta melalui input produksi yang murah, pemberian subsidi langsung terutama untuk infrastruktur, dan penurunan pajak. Berbagai insentif tersebut diharapkan para pengusaha tertarik menempatkan perusahaannya di lokasi-lokasi tertentu, sehingga mampu menggerakkan perkembangan ekonomi di lokasi-lokasi tersebut. Pendekatan kapasitas (*capacity building approach*) yang berkembang selama periode 1980-an menekankan pada pengembangan infrastruktur pendidikan dan teknologi dalam membangun basis pengetahuan yang diperlukan untuk menumbuhkembangkan daya kompetitif dalam merespon perubahan lingkungan ekonomi.

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dapat dilakukan melalui ekspor, pemasaran, klaster, kemitraan dan pemberdayaan. PEL memiliki tantangan dalam implementasinya, yakni instansi yang solid pada tingkat lokal untuk mengembangkan inisiatif lokal sumberdaya lokal (*local resources*), perbaikan *governance*, dan pengembangan jaringan (*networking*). Ciri utama PEL adalah menitikberatkan pada kebijakan “*endogenous development*”, yaitu mendayagunakan potensi sumber daya manusia, *institutional* dan fisik setempat. Orientasi ini mengarah dalam

proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi (Blakely, 1989). Tujuan Pengembangan Ekonomi Lokal adalah meningkatkan jumlah dan variasi peluang kerja yang tersedia untuk penduduk setempat. Pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dituntut untuk mengambil inisiatif, bukan hanya berperan pasif saja melainkan berperan aktif dalam penerapan pengembangan ekonomi lokal.

2.2.2 Pengertian pengembangan ekonomi local (*local economic development*)

Pengembangan Ekonomi Lokal (*local economic development*) merupakan proses di mana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Blakely and Bradshaw, 1994). Selain itu, menurut (Munir, 2007) Pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaan-kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Jadi, pengembangan wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal. Menurut Blakely dalam Supriyadi (2007, h.103-123) dalam keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: 1) perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha; 2) perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan; 3) keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran; dan 4) keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal.

2.2.3 Defenisi pengembangan ekonomi local (*local economic development*)

Dalam definisi Pengembangan Ekonomi Lokal (*local economic development*) tersebut, ada dua kata kunci yang dapat diambil yaitu; 1). kerja sama antar semua komponen dan, 2). Pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal. Kedua kata kunci tersebut sekaligus merupakan komponen pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal, dan tentunya keduanya sangat relevan dengan semangat desentralisasi dimana pemerintah daerah bersama-sama dengan seluruh komponen di dalamnya dituntut untuk mampu mengelola daerahnya sendiri dan mampu mengubah potensi lokal yang dimiliki menjadi kekuatan ekonomi sebagai sumber pertumbuhan dan perbaikan kualitas hidup penduduknya. Ada sejumlah prinsip utama yang mendasari konsep Pengembangan Ekonomi Lokal, di antaranya adalah sebagai berikut: a). Kemiskinan dan pengangguran merupakan tantangan utama yang dihadapi daerah sehingga strategi Pengembangan Ekonomi Lokal harus memprioritaskan pada peningkatan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan. b). Pengembangan Ekonomi Lokal harus menetapkan target pada masyarakat kurang beruntung, pada area dan masyarakat yang cenderung termarginalkan, pada usaha mikro dan kecil sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi nyata dalam kehidupan ekonomi setempat. c). Setiap daerah perlu mengembangkan dan memiliki sendiri strategi Pengembangan Ekonomi Lokal yang sesuai dengan kondisi daerahnya. d). Pengembangan Ekonomi Lokal mendukung kepemilikan local, keterlibatan masyarakat, kepemimpinan local, dan pengambilan keputusan bersama. e). Pengembangan Ekonomi Lokal menuntut terbangunnya kemitraan antara masyarakat, sektor usaha, dan swasta serta pemerintah daerah untuk memecahkan masalah bersama. f). Pengembangan Ekonomi Lokal (*local economic development*) memaksimalkan pemanfaatan sumber daya local (SDM), kemampuan, ketrampilan, dan peluang bagi pencapaian berbagai

tujuan. g). PEL memberikan keleluasaan bagi daerah untuk merespon perubahan lingkungan yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Dari beberapa definisi pengembangan ekonomi local dan penyesuaian terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Indonesia, Adji (2011) mendefinisikan PEL sebagai usaha mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya local yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat local dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah.

Bartik (2003) mendefinisikan PEL sebagai peningkatan dalam kapasitas ekonomi local untuk menciptakan kesejahteraan bagi penduduk local. Peningkatan yang dimaksud terjadi apabila sumber daya local, seperti tenaga kerja dan lahan, dimanfaatkan dengan lebih produktif. Pembangunan ekonomi juga terjadi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan lahan.

Pengembangan ekonomi local adalah aktivitas local yang merupakan proses pembangunan partisipatif di wilayah administrative local melalui kemitraan para pemangku kepentingan public dan swasta. Pendekatan ekonomi local menggunakan sumber daya local dan keunggulan kompetitif untuk menciptakan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (ILO 2010).

PEL mengutamakan peningkatan kesempatan kerja pendapatan rumah tangga, pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Dalam alur berpikir seperti ini, pembangunan ekonomi harus dilaksanakan di tingkat local dan penduduk local memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut (Chmura dan Orozobekov 2009).¹¹

Joseph (2002), Menawarkan Prinsip utama yang mendasari konsep PEL yaitu: (1) kemiskinan dan pengangguran merupakan tantangan utama dalam suatu wilayah, sehingga strategi

¹¹ Dr. Jef Rudianto Saragih. *Perencanaan wilayah dan pengembangan ekonomi local berbasis pertanian, teori dan aplikasi*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar Cetakan Ke-2, Januari 2018, Hlm.57

PEL harus memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan, (2) target awal PEL adalah penduduk miskin, masyarakat marginal, dan usaha mikro-kecil-menengah untuk memungkinkan mereka berpartisipasi penuh dalam perekonomian wilayah, (3) tidak ada pendekatan tunggal untuk PEL setiap wilayah memerlukan pendekatan sendiri yang merupakan cara terbaik dalam konteks wilayah tersebut, (4) PEL mempromosikan kepemilikan lokal dan pembuatan keputusan bersama, (5) PEL mencakup kemitraan local, nasional dan internasional antara masyarakat, pebisnis, dan pemerintah untuk mengatasi masalah, menciptakan usaha bersama, dan membangun wilayah local, (6) PEL memaksimalkan sumber daya, keahlian, dan peluang local untuk manfaat jamak, (7) pengembangan ekonomi local mencakup integrasi berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu pendekatan komprehensif untuk membangun suatu wilayah local, (8) PEL sebagai pendekatan yang luwes untuk merespons perubahan kondisi pada tingkat local, nasional dan internasional. Dari berbagai tinjauan kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa peran aktivitas ekonomi dalam PEL setidaknya dapat dilihat dari variable pendapatan, kesempatan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi.

2.2.4 Sasaran dan Tujuan pengembangan ekonomi local (*local economic development*)

Sasaran jangka panjang dari penerapan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal adalah pengentasan kemiskinan dan perbaikan yang terus menerus dan berkelanjutan dalam kualitas kehidupan dari suatu komunitas lokal di suatu daerah/wilayah. Untuk mencapai sasaran tersebut. Pengembangan Ekonomi Lokal memiliki tujuan yaitu: 1). Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah; 2). Menciptakan dan pemeratakan kesempatan kerja; 3). Meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat; 4). Meningkatkan daya saing ekonomi daerah terhadap daerah atau negara lain; 5). Membangun dan

mengembangkan kerja sama yang positif antar daerah. Focus pengembangan ekonomi local dari berbagai rujukan terpilih disajikan pada Tabel dibawah ini;

Tabel 2.2.4 PEL dari beberapa kepustakaan terpilih

Penulis/ institusi	Sasaran PEL
Bank Dunia (2011)	Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja berkelanjutan, daya saing, dan pemerataan
ILO (2010)	Kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Supriana dan Nasution (2010)	Pendapatan dan kesempatan kerja
Rustiadi et al. (2009)	Pendapatan dan tenaga kerja
UN-habitat (2009)	Penggunaan sumber daya local secara efektif (tenaga kerja, modal, dan sumber daya lainnya)
Chmura dan Orozobekov (2009)	Peningkatan kesempatan kerja pendapatan rumah tangga, pengurangan kemiskinan dan pengangguran
Weisbrod et al. (2004)	Kesempatan kerja dan tingkat pendapatan
Bartik (2003)	Peningkatan produktivitas sumber daya local (tenaga kerja, lahan)
James et al. (2002)	Pertumbuhan kesempatan kerja
Joseph. (2002)	Kesempatan kerja, pembangunan perdesaan berkelanjutan, manfaat bagi masyarakat miskin dan marginal
Blakely (1994)	Kesempatan kerja

Sumber: Dr. Jef Rudianto Saragih (2018), *Teori dan Aplikasi*. Hlm 64

2.2.5 Dimensi Relevansi Penerapan Pengembangan Ekonomi Local

Dari pengalaman pelaksanaan pembangunan yang banyak dilakukan selama ini baik di tingkat Nasional maupun Daerah. Telah terbukti bahwa pemecahan terhadap persoalan-persoalan ekonomi selama ini dilakukan secara parsial. entah itu sektoral atau kedaerahan, sehingga tidak mampu secara efektif mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang maksimal. Bahkan bukan tidak mungkin cara tersebut dapat menimbulkan persoalan baru dan memperburuk persoalan-persoalan di sisi yang lain. Sesuai dengan sasaran jangka panjang dan tujuannya. Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (*local economic development*) menekankan pada tercapainya

pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah. Penciptaan kesempatan kerja baru. Pemerataan pendapatan diantara masyarakat terutama masyarakat miskin dan meningkatkan daya saing daerah yang kesemuanya bermuara pada sasaran utama jangka panjang yaitu pengurangan kemiskinan secara signifikan dan peningkatan kesejahteraan hidupan masyarakat lokal.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Serta menekankan pada keterkaitan dan sinergi antar sektor dengan seluruh strategi pembangunan yang ada dalam suatu wilayah tertentu. Dengan bertumpu pada tiga komponen yang disebutkan sebelumnya, pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal diharapkan mampu menyediakan ruang dan membuka kesempatan bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memperbaiki interaksi diantara mereka. Serta menawarkan berbagai pilihan strategi yang dapat digunakan untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah melalui pemanfaatan sumber daya dan keterampilan yang dimiliki.

Pada pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (*local economic development*). Keterkaitan antar sektor dalam menerapkan suatu strategi pembangunan ekonomi menjadi hal yang krusial. Sebagai contoh dalam pengembangan kluster komoditas unggulan tertentu. adalah sangat penting untuk mengaitkan kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran. serta mengikutsertakan aspek permodalan. Teknologi, informasi, investasi, promosi pasar, ketersediaan tenaga kerja dan infrastruktur yang akan menjadi faktor pendukung bagi keberhasilan suatu komoditas untuk dapat unggul di pasar lokal dan internasional. Semua itu tentunya menuntut pelibatan banyak sektor dan aktor yang akan saling bersinergi dan bekerja sama satu sama lain untuk memajukan satu kluster ekonomi atau komoditas yang menjadi unggulan di daerah atau bahkan di tingkat nasional¹².

¹² Hania Rahma(2012); *Acuan Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Kota dan Kabupaten*. Direktorat Jenderal Cipla Karya. Kementerian Pekerjaan Umum. 2012

2.2.6 Tahapan Pengembangan Ekonomi Lokal (*local economic development*)

Pengembangan Ekonomi Lokal (*local economic development*) memiliki empat tahapan utama yang berada dalam satu siklus pengelolaan Pengembangan Ekonomi Lokal yang berkelanjutan yaitu: a). Tahap I: Persiapan. b). Tahap II: Perencanaan. c). Tahap III: Peleaksanaan. d). Tahap IV: Monitoring Dan Evaluasi (Monev)

a) Tahap 1: Persiapan

Tahap ini dimaksudkan sebagai tahap awal atau persiapan yang perlu dilakukan dalam rangka memulai menerapkan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (*local economic development*). Sebagian besar kegiatan dalam tahap ini terkait dengan penyiapan kelembagaan Pengembangan Ekonomi Lokal. Tahap Ini terdiri tiga langkah yaitu: Langkah I; Melakukan sosialisasi, penyebarluasan informasi, dan propaganda pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal. Langkah 2; Membentuk organisasi pelaksana Pengembangan Ekonomi Lokal di daerah. Langkah 3; Melakukan analisis terhadap kondisi sekarang.

b) Tahap II: Perencanaan

Sebelum memulai pada tahap pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Lokal (*local economic development*) itu sendiri. Daerah harus melalui tahap perencanaan. Tahap ini dimaksudkan agar daerah mampu merencanakan secara baik dan tepat pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Lokal. Langkah yang termasuk ke dalam tahapan ini adalah: 1; Mengidentifikasi dan menentukan kluster ekonomi sebagai fokus Pengembangan Ekonomi Lokal. 2; Membentuk dan mengembangkan forum kemitraan multi stakeholder Pengembangan Ekonomi Lokal. 3; Merumuskan dan menyusun strategi agenda program dan rencana aksi

Pengembangan Ekonomi Lokal. 4; Memastikan terpenuhinya kondisi bagi keberhasilan pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Lokal.

c) Tahap III : Pelaksanaan.

Tahap III adalah tahap pelaksanaan yaitu melaksanakan seluruh strategi dan agenda program Pengembangan Ekonomi Lokal (*local economic development*) yang telah ditetapkan pada Tahap II. Langkah-langkah yang dilakukan pada Tahap III ini lebih ditujukan pada hal-hal yang sangat penting yang sangat dianjurkan untuk dilakukan dan tidak ditinggalkan dalam proses pelaksanaan agenda program dan kegiatan yang terkait dengan Tahap II. apapun strategi Pengembangan Ekonomi Lokal yang dipilih. Sedangkan isi kegiatan dari setiap langkah pada Tahap III akan sangat fleksibel baik dari jenis dan volume kegiatan tergantung pada strategi dan agenda program Pengembangan ekonomi lokal yang dipilih Secara umum.

Tahap III ini terdiri dari 6 (enam) langkah yaitu: langkah 1; Meningkatkan dan memperkuat kapasitas stakeholder daerah. Langkah 2; Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya investasi baru dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah. Langkah 3; Mengembangkan, memperluas pasar dan melakukan promosi kluster ekonomi terpilih. Langkah 4; Memperkuat forum kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal yang telah terbentuk. Langkah 5; Mengembangkan dan memperkuat kapasitas, kemampuan dan ketrampilan produsen/usaha dan pekerja beserta organisasinya. Langkah 6; Membangun kerja sama antar daerah baik secara horizontal maupun vertikal.

d) Tahap IV : Monitoring Dan Evaluasi

Walaupun diletakkan pada tahap terakhir, kegiatan monitoring dan evaluasi tidak selalu harus diletakkan di akhir kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal (*local economic development*). Hal ini karena pada prinsipnya kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal

merupakan siklus sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi juga sangat penting dilakukan sepanjang pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Lokal. Tahap ini terdiri dari 1 (satu) langkah yaitu: Membangun sistem dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.¹³

2.2.7 Permasalahan Terkait Peran Pemerintah

Selama ini, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lebih menempatkan dirinya sebagai penentu dan pelaksana (eksekutor) program pembangunan dan menjadikan masyarakat hanya sebagai obyek, bukan subyek dari pembangunan tersebut. Peran tersebut sudah saatnya direposisi yaitu dengan menempatkan kembali posisi dan peran pemerintah di dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah sebaiknya mengurangi intervensinya yang terlalu jauh di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi terutama kegiatan ekonomi yang bukan merupakan fungsi dari keberadaan pemerintah dan seyogyanya lebih menempatkan perannya sebagai manajer fasilitator dan stimulator sesuai dengan semangat otonomi daerah dan reformasi. Pemerintah juga perlu mengubah cara pandang, cara pikir dan orientasinya dalam mengelola pembangunan dari pendekatan yang berorientasi ke-proyek-an menjadi berorientasi pada kebutuhan lokal atau pasar.

Pemerintah daerah melalui berbagai kebijakannya, harus memiliki komitmen penuh dan secara konsisten dan persisten memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan PEL untuk menjamin bahwa penerapan pendekatan PEL di daerahnya akan mencapai tujuan pembangunan dan pemerataan ekonomi yang diharapkan. Pemerintah daerah juga harus memberi prioritas pada kegiatan PEL yang memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat marjinal dan kurang beruntung dengan cara memberikan dorongan pada diterapkannya pendekatan PEL yang terbuka dan menjamin terdistribusikannya kembali manfaat tersebut bagi pembangunan ekonomi di

¹³ Hania Rahma(2012); *Acuan Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Kota dan Kabupaten*. Direktorat Jenderal Cipla Karya. Kementerian Pekerjaan Umum. 2012

daerah. Perubahan paradigma dan sikap tersebut tentunya tidak mudah bagi pemerintah namun harus dilakukan demi perbaikan pelaksanaan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah.

